



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404  
SURABAYA 60236

Surabaya, 6 Maret 2017

Nomor : 800/6283/204.2/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penerimaan Pendidikan  
Kedinasan Tahun 2017

Kepada :  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
di-  
TEMPAT

Menindaklanjuti Pengumuman dari Kementerian PAN dan RB Nomor: 125/S.SM.01.00/2017 Tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan Tahun 2017, diantaranya:

1. Kemenkeu/PKN STAN;
2. Kemendagri/IPDN;
3. Kemenhub/STTD;
4. Kemenkumham/POLTEKIP dan POLTEKIM;
5. BIN/STIN;
6. BPS/STIS;
7. BMKG/STMKG; dan
8. Lemsaneg/STSN.

Dapat disampaikan bahwa waktu pendaftaran pada tanggal 9-31 Maret 2017 melalui portal [www.panselnas.id](http://www.panselnas.id) dan dilakukan secara online.

Berkaitan dengan hal tersebut agar Saudara mengumumkan di papan pengumuman di lingkungan instansi Saudara sesuai dengan pengumuman resmi yang dapat di download di website Kementerian PAN dan RB pada alamat link <http://www.menpan.go.id/> sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya.



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19580227 198503 1 007



# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUKARNO KAV. 69 JAKARTA U. 190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

## PENGUMUMAN

NOMOR : 11/J.15 /S.SM.01.00/2017

## TENTANG

### PENERIMAAN CALON SISWA-SISWI/TARUNA-TARUNI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMPUNYAI LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN TAHUN 2017

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberitahukan kepada Putra-Putri terbaik lulusan SMU atau sederajat, bahwa:

1. Pada Tahun Anggaran 2017 akan dibuka penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan sebagai berikut :

No	Instansi/Lembaga Pendidikan Kedinasan	Jumlah yang diterima	Waktu Pendaftaran
1	Kemenkeu/PKN STAN	4.920 orana	9-31 Maret 2017
2	Kemendagri/IPDN	1.689 orana	9-31 Maret 2017
3	Kemendagri/STTD	165 orana	9-31 Maret 2017
4	Kemenkumham/POLTEKIP dan POLTEKIM	500 orana	9-31 Maret 2017
6	BINISTIN	124 orana	9-31 Maret 2017
6	BPSISTIS	600 orana	9-31 Maret 2017
7	BMKG/STMKG	250 orana	9-31 Maret 2017
8	lembaga/STSN	100 orana	9-31 Maret 2017

2. Peserta melakukan pendaftaran secara online melalui portal [www.panselnas.id](http://www.panselnas.id) sesuai dengan penjadwalan tersebut pada angka 1 {satu}.
3. Peserta hanya boleh mendaftar di salah satu dari 8 (delapan) instansi/Lembaga Pendidikan Kedinasan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan apabila mendaftar di 2 (dua) atau lebih Lembaga Pendidikan Kedinasan, maka yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan gugur.
4. Seleksi dilakukan secara bertahap di masing-masing Kementerian/lembaga. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Tahapan seleksi selanjutnya diatur oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
5. Setiap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti SKD dikenakan biaya Rp 50.000,- per peserta berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Teknis pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara.
6. Untuk lembaga Pendidikan Kedinasan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, selain dipungut biaya tersebut pada angka 6, dipungut pula biaya pendaftaran lain yang diatur oleh masing-masing Instansi/lembaga Pendidikan Kedinasan.
7. Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi.
8. Pengangkatan menjadi CPNS dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan yang bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan proses pembilasan bagi lulusan STTD) berdasarkan formulir yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Sehubungan dengan itu, kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang dikaitkan dengan proses penerimaan Siswa-Siswi/Taruna-Taruni tersebut. Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kefulness dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu.

Jakarta, 1 Maret 2017

ri Negara  
I,

  
**Dwi Wahyu Atmaji**  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA